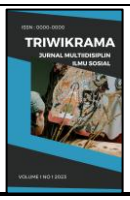
Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



STUDI EVALUASI DAMPAK PP NO. 108 TAHUN 2015 TERHADAP KESEJAHTERAN SUKU KOMODO DI PULAU KOMODO

Andreas Putra Jomi[1], Bambang Kusbandrijo[2], Rizkya Dwijayanti[3]
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received Juni, 2026
Revised Juni, 2026
Accepted Juni, 2026
Available online Juni, 2026

jomiandre123@gmail.com,
b_kusbandrijo@untag-sby.ac.id,
rizkya@untag-sby.ac.id

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

A B S T R A K

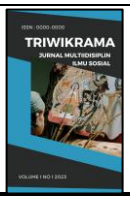
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo di Pulau Komodo. Kebijakan tersebut mengatur pengelolaan kawasan konservasi yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pengembangan pariwisata. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang dirasakan oleh masyarakat lokal sebagai kelompok yang hidup di kawasan konservasi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas masyarakat Suku Komodo, nelayan, pelaku wisata, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, sedangkan evaluasi kebijakan dianalisis menggunakan teori William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 efektif dalam mendukung pelestarian habitat komodo dan perkembangan sektor pariwisata di Pulau Komodo. Namun, manfaat kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Suku Komodo. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan akses permodalan, menyempitnya pilihan mata pencaharian, rendahnya akses pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan kesempatan untuk berpartisipasi dalam sektor pariwisata. Selain itu, kebijakan juga berdampak pada meningkatnya kecenderungan urbanisasi dan menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan budaya masyarakat lokal. Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, implementasi kebijakan dinilai berhasil pada aspek konservasi dan pengembangan pariwisata, namun belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Komodo secara merata.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan, PP Nomor 108 Tahun 2015, Kesejahteraan Masyarakat, Suku Komodo, William N. Dunn

A B S T R A C T

This study aims to evaluate the impact of the implementation of Government Regulation Number 108 of 2015 on the welfare of the Komodo indigenous community on Komodo Island. The regulation governs the management of conservation areas with the objectives of preserving the environment and supporting tourism development. However, its implementation has generated various impacts on local communities living within the conservation area. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving members of the Komodo community, fishermen, tourism actors, community leaders, and government representatives. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while policy evaluation was conducted using William N. Dunn's framework, consisting of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings indicate that the implementation of Government Regulation

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Number 108 of 2015 has been effective in supporting the conservation of the Komodo dragon habitat and promoting tourism development on Komodo Island. Nevertheless, the benefits of the policy have not been fully experienced by the Komodo community. Local residents continue to face limited access to business capital, restricted livelihood opportunities, inadequate access to education and skills development, and limited participation in the tourism sector. Furthermore, the policy has contributed to increasing urban migration among younger generations and raised concerns regarding the sustainability of local cultural identity. Based on William N. Dunn's six policy evaluation criteria, the policy has been successful in achieving conservation and tourism development objectives; however, it has not yet optimally improved the welfare of the Komodo community in an equitable manner.
***Keywords** : policy evaluation, Government Regulation Number 108 of 2015, community welfare, Komodo community, William N. Dunn*

PENDAHULUAN

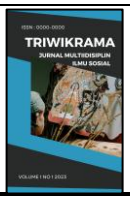
Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan nasional karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta memberikan dampak terhadap berbagai sektor pendukung lainnya. Pariwisata merupakan fenomena sosial, budaya, dan ekonomi yang melibatkan pergerakan manusia ke suatu daerah untuk berbagai tujuan, baik pribadi maupun profesional (Yakup, 2019). Selain berkontribusi terhadap perekonomian nasional, pengembangan pariwisata juga diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelestarian budaya dan lingkungan (Utami & Kafabih, 2021).

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar karena didukung oleh kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman budaya, tradisi, adat istiadat, serta bahasa daerah menjadi keunggulan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (Wibowo et al., 2017). Salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia adalah Taman Nasional Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini dikenal sebagai habitat asli komodo (*Varanus komodoensis*) dan memiliki keanekaragaman hayati serta keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Perkembangan pariwisata di kawasan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun.

Dalam rangka menjaga kelestarian kawasan konservasi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Kebijakan ini mengatur pengelolaan kawasan konservasi melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian kawasan konservasi. Selain bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi bagi masyarakat lokal, khususnya masyarakat Suku Komodo. Dalam upaya menjaga ekosistem laut, Balai Taman Nasional Komodo melakukan pembatasan terhadap aktivitas masyarakat, terutama nelayan tradisional. Nelayan tidak lagi bebas menangkap ikan di sejumlah wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan kawasan wisata bahari. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kehilangan sebagian akses terhadap sumber mata pencaharian yang selama ini menjadi penopang kehidupan mereka (Eriksson et al., 2019). Pembatasan wilayah tangkap tersebut menimbulkan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Nelayan harus mencari lokasi penangkapan ikan yang lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih tinggi dan risiko

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



yang lebih besar. Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata yang terus meningkat belum sepenuhnya memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal. Keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan akses permodalan menyebabkan masyarakat Suku Komodo mengalami kesulitan bersaing dalam sektor pariwisata. Akibatnya, sebagian besar masyarakat hanya terlibat pada pekerjaan sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah, sementara peluang usaha dan pekerjaan yang lebih besar banyak dimanfaatkan oleh pihak luar daerah.

Fenomena-fenomena diatas menunjukkan adanya perbedaan antara tujuan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dengan kondisi kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Suku Komodo. Penelitian Purnama dan Ibrahim (2024) menunjukkan bahwa masyarakat Desa Komodo melakukan resistensi terhadap pengelolaan kawasan karena kurangnya pemahaman mengenai zonasi dan kebijakan konservasi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada bentuk resistensi masyarakat terhadap pengelolaan kawasan wisata. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada evaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo melalui indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn. Selain itu, penelitian Naufal (2019) menunjukkan adanya dinamika akses masyarakat lokal terhadap sumber daya pariwisata melalui pembentukan berbagai kelembagaan lokal untuk mempertahankan kontrol dan akses terhadap sektor pariwisata. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada strategi akses masyarakat terhadap sumber daya wisata, sedangkan penelitian ini mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Beberapa penelitian diatas telah membahas dampak pariwisata terhadap masyarakat lokal dan pengelolaan kawasan konservasi, namun penelitian yang secara khusus mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo di Pulau Komodo menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

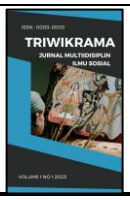
KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah dalam menanggapi suatu permasalahan. Melalui kebijakan publik, pemerintah berupaya mengatur, mengarahkan, serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.

Menurut Lasswell dan Kaplan, kebijakan merupakan sarana untuk mencapai tujuan dan berkaitan dengan nilai serta praktik. Pendapat serupa dikemukakan oleh James E. Anderson bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang memiliki maksud tertentu yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Dalam perspektif kebijakan publik, kebijakan merupakan pilihan rasional pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan sebagaimana dikemukakan oleh Thomas R. Dye. Kebijakan mencerminkan kehendak pemerintah dalam mengarahkan masyarakat menuju tujuan tertentu melalui kewenangan yang dimilikinya (Fatmariyanti & Fauzi, 2023).

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Kinerja Kebijakan Publik

Teori kinerja kebijakan publik merupakan salah satu bagian penting dalam kajian administrasi publik karena digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.

Menurut William N. Dunn (2003), kinerja kebijakan publik dapat dianalisis melalui lima kriteria evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Sementara itu, George C. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan kinerja kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten akan membantu pelaksana memahami tujuan kebijakan. Sumber daya yang memadai menjadi penunjang utama dalam pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, James E. Anderson (2011) menekankan bahwa kinerja kebijakan perlu dilihat dari dampak kebijakan terhadap kondisi masyarakat.

Jika ketiga pandangan tersebut dipadukan, maka kinerja kebijakan publik dapat dipahami sebagai hasil dari hubungan antara kualitas hasil kebijakan, kualitas proses implementasi, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat

Teori Evaluasi Kebijakan William N. Dunn

Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn sebagai indikator analisis untuk mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo di Pulau Komodo. Menurut Dunn, evaluasi kebijakan dapat dilakukan melalui enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan (*adequacy*), pemerataan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*).

Efektivitas digunakan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara hasil yang diperoleh dan sumber daya yang digunakan. Kecukupan mengukur sejauh mana kebijakan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pemerataan menilai distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada kelompok sasaran. Responsivitas mengukur kemampuan kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sementara itu, ketepatan digunakan untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sasaran.

Berdasarkan enam indikator tersebut, penelitian ini mengevaluasi dampak implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat lokal.

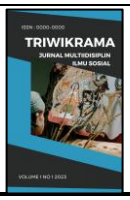
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mengeksplorasi makna yang berasal dari permasalahan sosial atau kemanusiaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan perspektif para informan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, karakteristik, dan hubungan antar fenomena yang terjadi di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Fokus penelitian diarahkan pada dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat Suku Komodo yang hingga saat ini masih dirasakan oleh masyarakat setempat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan. Adapun data

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sekunder diperoleh dari dokumen, peraturan perundang-undangan, arsip, literatur, jurnal, dan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data mengacu pada pendapat Creswell (2014) yang meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Komodo, nelayan, pedagang, pemandu wisata, anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat. Observasi dilakukan secara langsung selama kurang lebih satu bulan satu minggu di Desa Komodo dan kawasan Taman Nasional Komodo untuk mengamati kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan model analisis kualitatif menurut Creswell (2014) yang meliputi tahap pengorganisasian data, membaca keseluruhan data, proses coding, penyusunan kategori dan tema, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penafsiran data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 menunjukkan efektivitas yang cukup baik dalam mencapai tujuan konservasi lingkungan di kawasan Taman Nasional Komodo. Kebijakan ini mampu mendukung pelestarian habitat komodo serta menjaga keberlanjutan ekosistem darat dan laut. Selain itu, perkembangan pariwisata di kawasan Pulau Komodo juga mengalami peningkatan yang memberikan peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tetapi, efektivitas kebijakan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Suku Komodo sebagai kelompok yang terdampak langsung. Masyarakat masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses modal usaha, pembatasan wilayah tangkap nelayan, serta keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing dalam sektor pariwisata.

Sebagaimana disampaikan oleh Irsan, salah satu pemandu wisata lokal:

> *"Masyarakat Pulau Komodo sebenarnya ingin terlibat lebih banyak dalam sektor pariwisata, tetapi banyak yang masih terkendala pendidikan dan keterampilan sehingga sulit bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah."*

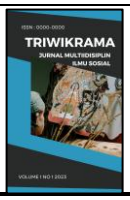
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Akibatnya, manfaat perkembangan pariwisata belum dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat Suku Komodo.

Berdasarkan indikator efektivitas William N. Dunn, kebijakan PP Nomor 108 Tahun 2015 dapat dinilai efektif dalam mendukung tujuan konservasi lingkungan dan pengembangan pariwisata. Namun, efektivitas tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal karena manfaat yang dihasilkan masih lebih dominan dirasakan pada aspek konservasi dan pariwisata dibandingkan aspek sosial ekonomi masyarakat.

Efisiensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan konservasi belum sepenuhnya efisien dari perspektif masyarakat lokal. Kebijakan memang dinilai berhasil menjaga kawasan konservasi, tetapi masyarakat harus menanggung berbagai biaya ekonomi sebagai konsekuensi

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



dari pembatasan aktivitas di kawasan tersebut. Nelayan tradisional mengalami peningkatan biaya operasional karena harus melaut lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan bahan bakar meningkat dan risiko keselamatan menjadi lebih besar.

Bakri selaku nelayan menyampaikan :

"Sekarang nelayan harus pergi lebih jauh untuk mencari ikan. Bahan bakar lebih banyak keluar, tetapi hasil tangkapan tidak selalu bertambah."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh masyarakat belum sepenuhnya sebanding dengan biaya dan pengorbanan yang harus mereka keluarkan. Selain itu, keterbatasan akses modal juga menyebabkan masyarakat kesulitan mengembangkan usaha yang dapat memanfaatkan perkembangan sektor pariwisata.

Berdasarkan indikator efisiensi William N. Dunn, implementasi kebijakan relatif efisien dalam mendukung tujuan konservasi, namun belum efisien dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Komodo karena biaya ekonomi yang ditanggung masyarakat masih cukup besar dibandingkan manfaat yang diterima.

Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana hasil suatu kebijakan mampu menjawab kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat Suku Komodo. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi masyarakat adalah keterbatasan akses terhadap sumber permodalan. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha, baik pada sektor perikanan maupun sektor pariwisata.

Arsit (penjual kelapa) menjelaskan bahwa masyarakat memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha, namun keterbatasan akses modal menjadi hambatan utama yang mereka hadapi.

"Kalau mau pinjam modal di bank susah karena tidak punya sertifikat tanah. Padahal banyak masyarakat yang ingin mengembangkan usaha sendiri."

Selain itu, masyarakat juga menghadapi keterbatasan pilihan mata pencaharian. Sebelum penguatan pengelolaan kawasan konservasi, sebagian masyarakat masih dapat memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian dan peternakan skala kecil. Namun, berbagai pembatasan pemanfaatan lahan menyebabkan masyarakat semakin bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata sebagai sumber penghasilan utama. Ketergantungan terhadap dua sektor tersebut menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat menjadi rentan. Ketika hasil tangkapan ikan menurun atau jumlah kunjungan wisatawan berkurang, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan lain yang dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga.

Berdasarkan indikator kecukupan William N. Dunn, implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 belum sepenuhnya memadai dalam menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat Suku Komodo. Kebijakan mampu mendukung pelestarian lingkungan dan perkembangan pariwisata, namun hasil yang dicapai belum cukup untuk mengatasi persoalan mendasar masyarakat, terutama terkait akses modal, diversifikasi mata pencaharian, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat perkembangan pariwisata di Pulau Komodo belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

masyarakat Suku Komodo. Perkembangan sektor pariwisata telah menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui usaha jasa wisata, transportasi, perdagangan, dan kegiatan usaha lainnya. Namun, sebagian besar peluang tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak luar yang memiliki modal, pendidikan, pengalaman, dan jaringan usaha yang lebih baik dibandingkan masyarakat lokal.

Irsan menjelaskan bahwa masyarakat lokal masih menghadapi berbagai keterbatasan untuk bersaing dalam sektor pariwisata.

"Banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan bahasa asing dan keterampilan tertentu. Masyarakat lokal masih banyak yang belum memiliki kemampuan itu sehingga kalah bersaing dengan orang dari luar."

Selain keterbatasan keterampilan, akses terhadap permodalan juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam usaha pariwisata. Akibatnya, masyarakat lokal lebih banyak bekerja pada sektor informal atau usaha berskala kecil, sedangkan usaha yang menghasilkan keuntungan lebih besar umumnya dimiliki oleh pelaku usaha dari luar daerah. Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari perkembangan pariwisata belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat Suku Komodo. Masyarakat lokal belum sepenuhnya menjadi pelaku utama dalam pemanfaatan potensi ekonomi yang berkembang di wilayah mereka sendiri.

Berdasarkan indikator pemerataan William N. Dunn, implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 belum mencapai tingkat pemerataan yang optimal. Meskipun perkembangan pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan, distribusi manfaat ekonomi masih cenderung lebih banyak dinikmati oleh pihak yang memiliki modal dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan masyarakat lokal.

Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat Suku Komodo belum berjalan secara optimal. Masyarakat masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun Pulau Komodo berkembang sebagai destinasi wisata internasional, masyarakat lokal belum sepenuhnya memperoleh dukungan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mampu bersaing dalam sektor pariwisata.

Irus selaku nelayan setempat menyampaikan bahwa masyarakat masih jarang memperoleh pelatihan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan lapangan.

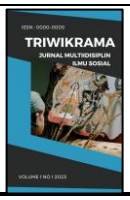
"Pelatihan memang pernah ada, tetapi tidak sering dan tidak semua masyarakat bisa ikut. Padahal banyak yang ingin belajar supaya bisa bekerja di sektor wisata."

Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih belum berjalan secara maksimal. Beberapa informan mengaku jarang memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi. Hal tersebut menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai manfaat program yang telah dilaksanakan.

Pemerintah menilai berbagai program bantuan dan pendidikan telah tersedia, namun di sisi lain masyarakat merasa bahwa program tersebut belum mampu menjawab kebutuhan utama yang mereka hadapi, terutama terkait kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan indikator responsivitas William N. Dunn, implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 belum menunjukkan tingkat responsivitas yang optimal. Program yang tersedia belum

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12, Number 2, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi akibat perkembangan kawasan konservasi dan pariwisata.

Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan berkaitan dengan kesesuaian kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Suku Komodo pada dasarnya mendukung kebijakan konservasi karena dianggap penting untuk menjaga keberlangsungan habitat komodo dan kelestarian lingkungan Pulau Komodo. Masyarakat memahami bahwa keberadaan komodo merupakan bagian penting dari kawasan konservasi sekaligus menjadi daya tarik utama sektor pariwisata. Oleh karena itu, upaya perlindungan lingkungan dipandang sebagai kebutuhan yang harus dijaga untuk kepentingan generasi mendatang.

Masyarakat menilai bahwa pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal. Salah satu persoalan yang dirasakan adalah semakin terbatasnya ruang permukiman akibat sebagian besar wilayah Pulau Komodo berada dalam kawasan konservasi. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Bakri menjelaskan bahwa masyarakat tidak menolak konservasi, tetapi berharap keberadaan masyarakat lokal juga menjadi perhatian dalam pengelolaan kawasan.

"Kami mendukung konservasi karena komodo harus dijaga. Tetapi masyarakat yang sejak dulu tinggal di sini juga harus diperhatikan supaya tetap bisa hidup dan berkembang di Pulau Komodo."

Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan akses pendidikan, lapangan pekerjaan, dan ruang hidup mendorong sebagian generasi muda meninggalkan Pulau Komodo untuk mencari kehidupan di daerah lain. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan identitas budaya masyarakat Suku Komodo yang selama ini diwariskan secara turun-temurun.

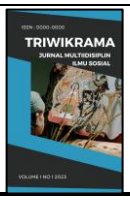
Berdasarkan indikator ketepatan William N. Dunn, implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 telah tepat dalam mendukung tujuan pelestarian lingkungan dan perlindungan habitat komodo. Namun, dari perspektif masyarakat lokal, kebijakan tersebut belum sepenuhnya tepat dalam menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Suku Komodo sehingga diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara tujuan konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 menunjukkan keberhasilan dalam mendukung pelestarian habitat komodo dan menjaga keberlanjutan kawasan konservasi di Pulau Komodo. Kebijakan tersebut juga berkontribusi terhadap perkembangan sektor pariwisata yang menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi kawasan.

Manfaat yang dihasilkan justru belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Suku Komodo. Masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, menyempitnya pilihan mata pencaharian, rendahnya akses pendidikan dan keterampilan, serta terbatasnya kesempatan untuk berpartisipasi secara optimal dalam sektor pariwisata. Selain itu, perkembangan kawasan konservasi dan pariwisata juga menimbulkan dampak sosial budaya berupa meningkatnya kecenderungan urbanisasi dan kekhawatiran terhadap keberlangsungan identitas budaya masyarakat lokal.

Berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, implementasi PP Nomor 108 Tahun 2015 dapat dinilai efektif dalam mencapai tujuan konservasi dan pengembangan pariwisata. Akan tetapi, aspek efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan



masih belum sepenuhnya terpenuhi karena manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh masyarakat Suku Komodo sebagai kelompok yang terdampak langsung. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, akses permodalan, serta perluasan kesempatan ekonomi agar tujuan konservasi dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara seimbang.

SARAN

Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan sumber permodalan bagi masyarakat Suku Komodo agar mampu berpartisipasi secara lebih optimal dalam sektor pariwisata. Selain itu, diperlukan komunikasi yang baik dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi sehingga tujuan pelestarian lingkungan dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Eriksson, B., Johansson, F., & Blicharska, M. (2019). Socio-economic impacts of marine conservation efforts in three Indonesian fishing communities. *Marine Policy*, *103*, 59–67. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.007

Fatmariyanti, Y., & Fauzi, A. (2023). Kebijakan Publik Versi William Dunn: Analisis Dan Implementasi. *Journal of Humanities and Social Studies*, *1*(1), 1–9.

Naufal, M. I. (2019). *Akses Masyarakat Terhadap Sumberdaya Pariwisata dalam Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat*.

Purnama, A. O. D. A. A., & Ibrahim, M. (2024). Resistensi Masyarakat Lokal Terhadap Pengelolaan Pariwisata Taman Nasional Komodo (Studi Kasus Desa Komodo). *Jurnal Perspektif*, *7*(1), 84–93. https://doi.org/10.24036/perspektif.v7i1.905

Utami, B. A., & Kafabih, A. (2021). Sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi COVID 19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, *4*(1), 383–389.

Wibowo, S., Rusmana, O., & Zuhelfa, Z. (2017). Pengembangan Ekonomi Melalui Sektor Pariwisata Tourism. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, *1*(2), 93–99. https://doi.org/10.34013/jk.v1i2.13

Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata TerhadapPertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Universitas Airlangga*. https://drive.google.com/file/d/1O-tF5Tpbqelql-xx_R6cWjlY_Fczlex8/view?usp=drivesdk